

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Stewardship**

Menurut Donaldson & Davis (1991) *Stewardship Theory* menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu masing-masing melainkan lebih fokus pada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat asli manusia yaitu memiliki integritas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta berlaku jujur untuk pihak lainnya.

*Stewardship Theory* merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh para manajemen berdasarkan kepercayaan pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori ini disebut juga dengan teori pengabdian yang dimana manajemen dalam organisasi melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggungjawab karena manajemen dicerminkan sebagai *good steward*.

Untuk mencapai *good governance*, pembuatan LKPD harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan dkk, 1996) dan (David, 2006). Akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principal*. Terdapat kontrak hubungan antara *steward* dan *principal* atas dasar kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pihak masyarakat atau *principal* memberikan kepercayaannya kepada pihak yang

dianggap dapat menjalankannya yaitu *steward* (SKPD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Relevansi teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai suatu organisasi yang dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan kepentingan publik, sehingga tujuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik tercapai secara maksimal. *Steward* memberikan suatu pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dapat dipercaya oleh masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan. Ketika semua diterapkan maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## **2. Manajemen Control System**

Sistem pengendalian manajemen ialah sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktifitas suatu organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005). Sistem pengendalian manajemen diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian manajemen bertugas memastikan agar kebijakan dan strategi ini dilaksanakan, maka

dari itu manajemen memerlukan suatu sistem untuk mengalokasikan penggunaan berbagai sumber ekonomi perusahaan secara efektif dan efisien.

Sistem pengendalian manajemen menurut Supriyono (2000) adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Menurut Sumarsan (2013) sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus.

Sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan suatu operasi perusahaan agar strategi dan kebijakan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen untuk memastikan tingkat keselarasan tujuan, dimana manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang selaras antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan (Anthony & Govindarajan, 2005). Dalam implementasi penelitian ini sistem pengendalian internal ada dan penting pada suatu SKPD. Jika sistem pengendalian internal pada SKPD nya bagus maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD tersebut.

### **3. Teori organisasi**

Organisasi merupakan tempat yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011)

menyebutkan organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Stoner (1990) menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu pola beberapa hubungan melalui orang-orang yang sedang berada dibawah pengarahannya dalam mengejar tujuan bersama.

Menurut Hebert & Gullet (1987) organisasi adalah suatu proses dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Organisasi merupakan keadaan dimana tiap-tiap kelompok atau orang melakukan interaksi berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggungjawab yang tersusun secara hierarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi dalam penelitian ini sistem pengendalian internal penting diterapkan di suatu organisasi atau dalam penelitian ini ialah SKPD, sistem pengendalian internal yang baik maka akan berpengaruh terhadap SKPD untuk dapat mencapai tujuan dari SKPD tersebut.

#### **4. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintah dalam kerangka konseptual laporan keuangan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, karakteristik kualitas laporan keuangan:

##### **a. Relevan**

Informasi akuntansi yang relevan yaitu dapat membantu pengguna untuk memprediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan atau untuk memperbaiki harapan sebelumnya. Dari hasil yang sudah diambil umumnya akan meningkatkan kemampuan pembuat keputusan untuk

memprediksi hasil dari tindakan serupa dimasa mendatang. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur :

a) *Feedback value*

Manfaat umpan balik mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu.

b) *Predictive value*

Informasi ini dapat membantu pengguna untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa lalu.

c) *Timeliness*

Informasi harus disajikan tepat waktu kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

d) *Lengkap*

Informasi yang dihasilkan harus lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam informasi tersebut.

b. *Andal*

Andal yaitu terbebas dari kesalahan material, menyajikan informasi secara jujur berdasarkan fakta, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian yang jujur, informasi disajikan secara wajar dan jujur berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan.
- b) Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji
- c) Netralitas, Informasi tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d) Dapat dibandingkan

Informasi tentang perusahaan tertentu sangat bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa untuk beberapa periode untuk dapat meningkatkan nilai informasi perbandingan. Pentingnya informasi kuantitatif sangat bergantung pada kemampuan pengguna untuk menghubungkannya dengan beberapa informasi lainnya.

- e) Dapat dipahami

Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus menggunakan istilah-istilah yang mudah sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna.

Berhubungan dengan tingkat keandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan, laporan keuangan harus memiliki penyajian yang wajar, jujur, obyektif, dan netral. Sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada (QS. Al-Maidah: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ الْقِسْطِ شُهَدَاءَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## **5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **a. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah informasi-informasi yang melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha. Laporan keuangan pemerintah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan daerah yang terstruktur dan menyajikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bastian,2001). (Mansur dkk, 2017) laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi-informasi yang digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan.

Upabayu & Putra (2014) laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas pada suatu periode akuntansi yang berupa catatan informasi. Penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang terkait posisi keuangan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode berjalan. Laporan keuangan daerah seharusnya berkualitas agar tepat dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan daerah harus menyajikan laporan keuangan yang benar-benar layak untuk digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat komponen-komponen dalam satu laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan financial, sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan memberikan gambaran dari kinerja entitas dari informasi-informasi keuangan suatu entitas dalam satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan tentang tujuan dari laporan keuangan yang diharapkan dapat menyajikan informasi yang



bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dari segi ekonomi, politik, dan sosial dengan cara :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **6. Sistem Pengendalian Internal**

Pemerintah dituntut untuk melakukan kontrol internal yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat (Saputro & Mahmud, 2015). Menurut Surastiani & Handayani (2015) penggunaan sistem pengendalian internal yang

memadai akan meningkatkan kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan bagi para pemakai informasi. *Control Internal* yang efektif dapat menurunkan resiko informasi, dan meningkatkan kelengkapan serta keakuratan yang direncanakan (Herath & Albarqi, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan untuk tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal dibagi menjadi lima kelompok yaitu :

1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2) Penilaian resiko

Penilaian resiko dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan strategi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah penetapan tujuan ditetapkan selanjutnya melakukan identifikasi risiko

atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

### 3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

### 4) Informasi dan komunikasi

Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari hasil data yang telah diolah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

### 5) Pemantauan

Pemantauan intern menurut PP No 60 tahun 2008 mendefinisikan sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Kelima unsur sistem pengendalian internal merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan proses pengendalian adalah orang-orang atau sumber daya di dalam organisasi yang

membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

## **7. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting untuk menciptakan pemerintah daerah yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Nuryanto & Afifah (2013) menyatakan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyelesaikan tugas mereka didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan, dan didukung oleh sikap yang dimiliki dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam menerapkan sistem akuntansi di pemerintahan memerlukan sdm yang berkualitas agar dapat memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sdm dalam memahami logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan dalam membuat laporan keuangan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan fungsi guna mencapai tujuannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab nya (Mansur dkk, 2017). Untuk melihat kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi dapat dilihat dari tingkat tanggungjawab dan kompetensi sumber daya tersebut. Menurut Sedamayanti (2004) ciri dari manusia yang berkualitas adalah memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri, mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya, mempunyai watak yang dinamis, bersedia dan mampu bekerjasama dengan pihak lain.

## **8. Teknologi Informasi**

Pemerintah Indonesia mewajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Untuk menindaklanjuti pembangunan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi keuangan ke layanan publik. Pemerintah dapat bekerja secara efisien dan efektif dengan membangun sistem informasi dengan cara pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Jurnal & Supomo (2002) dalam melaksanakan tugas-tugas akuntansi dengan pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi. Teknologi informasi dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi dengan lebih cepat serta lebih akurat dan meminimalisir adanya kekeliruan (Indisari, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi meliputi

- a. Pengolahan informasi, pengolahan data, proses kerja secara elektronik, dan sistem manajemen.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan pelayanan kepada public agar dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

## **9. Gaya Kepemimpinan**

Menurut Sedarmayanti (2013) Gaya Kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran tercapai. Dengan Berbagai macam gaya kepemimpinan pemimpin seharusnya dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada bawahannya untuk mencapai tujuan

bersama serta cara agar anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2012).

Pemimpin dapat menentukan arah keberhasilan suatu organisasi karena pemimpin merupakan pemeran utama (Agung & Gayatri, 2018). Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pimpinan dapat berpengaruh pada hasil kerja anggota organisasi karena pemimpin harus dapat mempengaruhi perilaku dan sikap anggotanya dalam menyelesaikan tugasnya. Situasi kepemimpinan, ada tiga komponen yang menentukan kontrol dan pengaruh dalam suatu situasi, yaitu (1) hubungan pemimpin dan pengikut (2) struktur tugas dan (3) kekuasaan posisional.

## **10. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan usaha untuk membangun organisasi dengan nilai-nilai positif dan menunjukkan keinginan untuk aktif terlibat dalam organisasi serta menunjukkan loyalitas seorang karyawan (Vandenberg, 1992). Komitmen organisasi dimana mereka mau bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta mau meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas mereka pada suatu organisasi.

Dalam pemerintah daerah, aparat daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi dapat menyiapkan laporan keuangan yang relatif sesuai. Komitmen organisasi dapat menjadi alat psikologi dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri & Parker, 1996). Dengan adanya

komitmen organisasi maka kepatuhan dalam presentasi dapat diandalkan dan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai keadaan dimana individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Karyawan yang memiliki komitmen akan bekerja penuh dedikasi, memiliki keinginan untuk bertanggungjawab agar mencapai kesejahteraan dan keberhasilan organisasi (Allen dan Mayer,1990).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penulis, Tahun</b>	<b>Sampel</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Fitrini Mansur, Eko Prasetyo, Reka Maiyarni, 2017	11 instansi di Kabupaten Muara Jambi	VD: Nilai Informasi Laporan Keuangan VI <sub>1</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah VI <sub>2</sub> : Sistem Pegendalian Internal VI <sub>3</sub> : Sumber Daya Manusia VI <sub>4</sub> : Teknologi Informasi	H1: VI <sub>1</sub> →+ VD (S) H2: VI <sub>2</sub> →- VD (NS) H3: VI <sub>3</sub> →- VD (NS) H4: VI <sub>4</sub> →- VD (NS)
Tut Madiguna Agung & Gayatri, 2018	Metode purposive sampling, SKPD Kab. Karangasem	VD: Kualitas Laporan Keuangan VI <sub>1</sub> : Gaya Kepemimpinan VI <sub>2</sub> : Kompetensi SDM VI <sub>3</sub> : Sistem Pegendalian Internal VI <sub>4</sub> : Komitmen Organisasi VI <sub>5</sub> : Pemanfaatan	H1: VI <sub>1</sub> →+ VD (S) H2: VI <sub>2</sub> → +VD (S) H3: VI <sub>3</sub> →+ VD (S) H4: VI <sub>4</sub> →+ VD

Penulis, Tahun	Sampel	Variabel	Hasil
		Teknologi Informasi	(S) H5: VI <sub>5</sub> → + VD (S)
Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2017	28 SKPK Kabupaten Aceh Tengah	VD: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah VI <sub>1</sub> : Kualitas Aparatur Daerah VI <sub>2</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi VI <sub>3</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah	H1: VI <sub>1</sub> → + VD (S) H2: VI <sub>2</sub> → + VD (S) H3: VI <sub>3</sub> → + VD (S)
Febry Pedrana Kusuma, I Nyoman Mahaendra Yasa, I Ketut Djayastra. 2016	39 SKPD Kabupetan Jembrana	VD <sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Internal VD <sub>2</sub> : Kualitas Informasi LKPD VI <sub>1</sub> : Kualitas SDM VI <sub>2</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah VI <sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi	H1: VI <sub>1</sub> → + VD <sub>1</sub> (S) H2: VI <sub>2</sub> → + VD <sub>1</sub> (S) H3: VI <sub>3</sub> → + VD <sub>1</sub> (S) H4: VI <sub>1</sub> → + VD <sub>2</sub> (S) H5: VI <sub>2</sub> → + VD <sub>2</sub> (S) H6: VI <sub>3</sub> → + VD <sub>2</sub> (S) H7: VD <sub>1</sub> → + VD <sub>2</sub> (S)
Dyah Puri Surastiani, Bestari Dwi Handayani. 2015	Random Sampling, 24 SKPD	VD: Kualitas Informasi Laporan Keuangan VI <sub>1</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia VI <sub>2</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi VI <sub>3</sub> : Sistem Pengendalian Internal	H1: VI <sub>1</sub> → + VD (S) H2: VI <sub>2</sub> → - VD (NS) H3: VI <sub>3</sub> → + VD (S)
Nur Laila Yuliani,	Purposive sampling, 30	VD: Kualitas Laporan Keuangan	H1: VI <sub>1</sub> → - VD (NS)



<b>Penulis, Tahun</b>	<b>Sampel</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Rahmawati Dwi Agustini. 2016	SKPD Kabupaten Magelang	VI <sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia VI <sub>2</sub> : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah VI <sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi VI <sub>4</sub> : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah VI <sub>5</sub> : Pengendalian Internal	H2: VI <sub>2</sub> → +VD (S) H3: VI <sub>3</sub> → +VD (S) H4: VI <sub>4</sub> → - VD (NS) H5: VI <sub>4</sub> → - VD (NS)
Fitriana, Agus Wahyudin. 2017	46 OPD Kabupaten Purbalingga	VD: Quality Of Local Government Financial Statements VI <sub>1</sub> : Utilization of Accounting Information System (SIA) VI <sub>2</sub> : Competence of human resources (KSDM) VM <sub>0</sub> : Internal Control System	H1: VI <sub>1</sub> → +VD (S) H2: VI <sub>2</sub> → -VD (NS) H3: VM <sub>0</sub> → - VI <sub>1</sub> → VD (TM)

### C. Hipotesis

#### 1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap sistem pengendalian internal

Salah satu unsur sistem pengendalian internal dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang baik juga bagi suatu organisasi dan sebaliknya jika lingkungan pengendalian yang tidak baik maka terdapat indikasi jalannya suatu organisasi yang tidak baik. Untuk mencapai lingkungan pengendalian internal

yang baik dibutuhkan adanya sumber daya manusia dikarenakan sumber daya manusia merupakan pondasi dari pengendalian didalam suatu organisasi.

Sumber daya manusia dapat membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Untuk mencapai penerapan sistem pengendalian internal yang bagus dibutuhkan adanya kualitas sumber daya manusia sehubungan dengan teori sistem pengendalian manajemen dimana terdapat sistem yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Dalam suatu organisasi dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas aparatur daerah. *Manajemen control system* merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan secara efektif dan efisien (Supriyono, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2014) menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Menurut Kibtiyah dkk (2017) Kompetensi pejabat berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk (2016) dan Evana dkk (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

**H<sub>1</sub> : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal**

## **2. Pengaruh teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal**

Peranan teknologi informasi terhadap akuntansi yaitu efisien, penghematan waktu dan biaya. Serta peningkatan efektifitas untuk mencapai

hasil/output laporan keuangan dengan benar. Dalam teori akuntansi dan organisasi pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

Keunggulan dari teknologi informasi adalah kemampuannya untuk menangani transaksi dalam jumlah yang besar dengan efisien. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian-pengendalian terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses (Elder dkk, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat melakukan kontrol internal yang baik maka perlu adanya teknologi informasi yang memadai.

Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005). Sistem yang digunakan oleh organisasi meliputi teknologi informasi yang mempunyai fungsi dalam membantu penerapan sistem pengendalian internal untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2016) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

**H<sub>2</sub> : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal**

### **3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap sistem pengendalian internal**

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2012). Sistem pengendalian internal menurut PP No 8 tahun 2008 adalah proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan adalah gaya atau cara pemimpin untuk secara terus menerus menerapkan sistem pengendalian internal. Pada pasal 47 ayat 1 dalam PP No 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan public bertanggungjawab atas efektivitas implementasi pengendalian internal.

Sesuai dengan teori organisasi yang dikemukakan oleh Stoner (1990) organisasi merupakan suatu pola beberapa hubungan melalui orang-orang yang sedang berada dibawah pengarahan atasan dalam mengejar tujuan bersama. Didalam organisasi SKPD terdapat gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam memberikan arahan dan bertanggungjawab dalam menerapkan sistem pengendalian internal agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Pemantauan yang lemah oleh pemimpin dapat menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal (Hayati,2015). Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2013) , Kibtiyah dkk (2017) dan Schaefer (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

**H<sub>3</sub> : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal**

#### **4. Pengaruh komitmen organisasi terhadap sistem pengendalian internal**

Komitmen organisasi merupakan keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi (Robbins, 1996). Komitmen organisasi merupakan komitmen dimana mereka mau bekerja dan tetap tinggal dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan loyalitas pada suatu organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi dalam diri individu, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan suatu organisasi.

Dengan adanya komitmen organisasi maka tujuan dari sistem pengendalian internal seperti kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dapat tercapai. Organisasi ialah suatu proses dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan (Hebert & Gullet 1987). Dalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi dan peraturan-peraturan yang ditegakkan sehingga dibutuhkan adanya komitmen organisasi untuk dapat memberikan pengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Schaefer (2014) pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi dari pegawainya. Budi (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian manajemen.

**H<sub>4</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal**

## **5. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

Sumber daya manusia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Sumber daya manusia yang baik yaitu individu yang fokus pada tujuan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sdm yang berkualitas yakni yang kompeten dibidang akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi dibidang akuntansi.

Sesuai dengan teori stewardship SKPD akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Agung & Gayatri (2018), Kusuma dkk (2016) dan Surastiani & Handayani (2015) menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>5</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

## **6. Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

Kemajuan teknologi informasi yang pesat dapat memberikan informasi keuangan daerah secara akurat dan cepat serta, memberikan akses yang mudah kepada berbagai pihak untuk mengakses informasi keuangan tersebut. Teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data dengan melihat ketepatan waktu, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak kehilangan nilai informasinya. Menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas kerja secara efisien dan efektif. Teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data secara tepat waktu sehingga tidak kehilangan nilai informasinya.

Sesuai dengan teori *stewardship* SKPD akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mampu bertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Teknologi informasi dibutuhkan untuk mempercepat proses pengolahan data. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri, (2018), Efendi dkk (2017), Yuliani & Agustini (2016) dan Kusuma dkk (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>6</sub>: Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.**

## **7. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

Gaya kepemimpinan dapat mengarahkan bawahannya untuk bekerja secara produktif dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan dapat membuat karyawannya mengikuti peraturan-peraturan di dalam organisasi tersebut (pramudita,2013). Gaya kepemimpinan dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk mau bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Sesuai dengan teori stewardship SKPD akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Organisasi membutuhkan pemimpin yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada bawahannya untuk dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018) dan Herniyasa dkk (2015) menyatakan bahwa gaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **H<sub>7</sub>: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

## **8. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

Menurut Cherington (1998) komitmen organisasi dinyatakan sebagai sikap loyal pada perusahaan. Semakin tinggi loyalitas karyawan terhadap organisasi maka semakin tinggi komitmen organisasinya. Komitmen organisasi



yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu lingkungan kerja dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Aparat daerah yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi dapat menyiapkan laporan keuangan yang relatif sesuai. Dengan adanya komitmen organisasi maka dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan standarisasi pemerintah yang berlaku. Komitmen organisasi merupakan syarat dari sebuah keberhasilan dalam organisasi.

Sesuai dengan teori *stewardship* SKPD akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Komitmen organisasi dibutuhkan pada tiap aparatur daerah dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Komitmen aparat memberikan pengaruh terhadap kualitas sistem informasi yang akan memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan (Tambingon, Yadiati, & Kewo, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018) dan Malfin (2017) menemukan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>8</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

#### **9. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

Tujuan dari sistem pengendalian internal pemerintah ialah untuk mencapai kegiatan yang efektif, menghasilkan laporan keuangan yang dapat

diandalkan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari sistem pengendalian internal tersebut selaras dengan karakteristik kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan teori *stewardship* SKPD akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Dalam upaya untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan, SKPD harus dapat menerapkan sistem pengendalian internal untuk dapat mencapai kegiatan yang efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Semakin kuat dan semakin efektif pengendalian internal, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan (Herath & Albarqi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Afiah & Azwari (2015), Agung & Gayatri (2018), Kusuma (2016) dan Surastiani & Handayani (2015) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>9</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah**

**10. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening**

Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi, teori steward menyatakan SKPD sebagai organisasi memberikan suatu pelayanan terbaik kepada publik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Dalam suatu organisasi

dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal untuk dapat mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan didukung oleh sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka diharapkan sumber daya manusia dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Kusuma dkk (2016) terdapat pengaruh tidak langsung kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal.

**H<sub>10</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah melalui sistem pengendalian internal**

#### **11. Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah melalui sistem pengendalian internal**

*Manajemen control system* merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi, dan teori *steward* yang menyatakan SKPD sebagai organisasi memberikan suatu pelayanan terbaik kepada publik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut. Dalam suatu organisasi dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal untuk mengendalikan aktivitas

didalam organisasi. untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang bagus maka diharapkan teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Menurut Kusuma dkk (2016) terdapat pengaruh tidak langsung teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal.

**H<sub>11</sub>: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening**

## **12. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah melalui sistem pengendalian internal**

Pada PP No.60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan publik bertanggungjawab atas efektivitas implementasi pengendalian internal. Dengan adanya PP no. 60 tahun 2008, setiap instansi diwajibkan menerapkan sistem pengendalian internal sehingga dibutuhkan gaya kepemimpinan yang baik untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, menghasilkan laporan keuangan yang andal agar mencapai laporan keuangan yang berkualitas.

*Manajemen control system* merupakan sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Dalam suatu organisasi dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal agar dapat mengendalikan

aktivitas organisasi. Stoner (1990) menyatakan organisasi adalah suatu pola beberapa hubungan melalui orang-orang yang sedang berada dibawah pengarahan atasan dalam mengejar tujuan bersama. Menurut Hebert & Gullet (1987) menyatakan bahwa organisasi ialah proses dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Didalam suatu organisasi diperlukan adanya sistem pengendalian internal agar terdapat struktur organisasi dan prosedur yang jelas berdasarkan otorisasi dari pihak berwenang. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan pemimpin yang dapat memberikan motivasi dan arahan kepada bawahannya melalui sistem pengendalian internal.

**H<sub>12</sub>: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening**

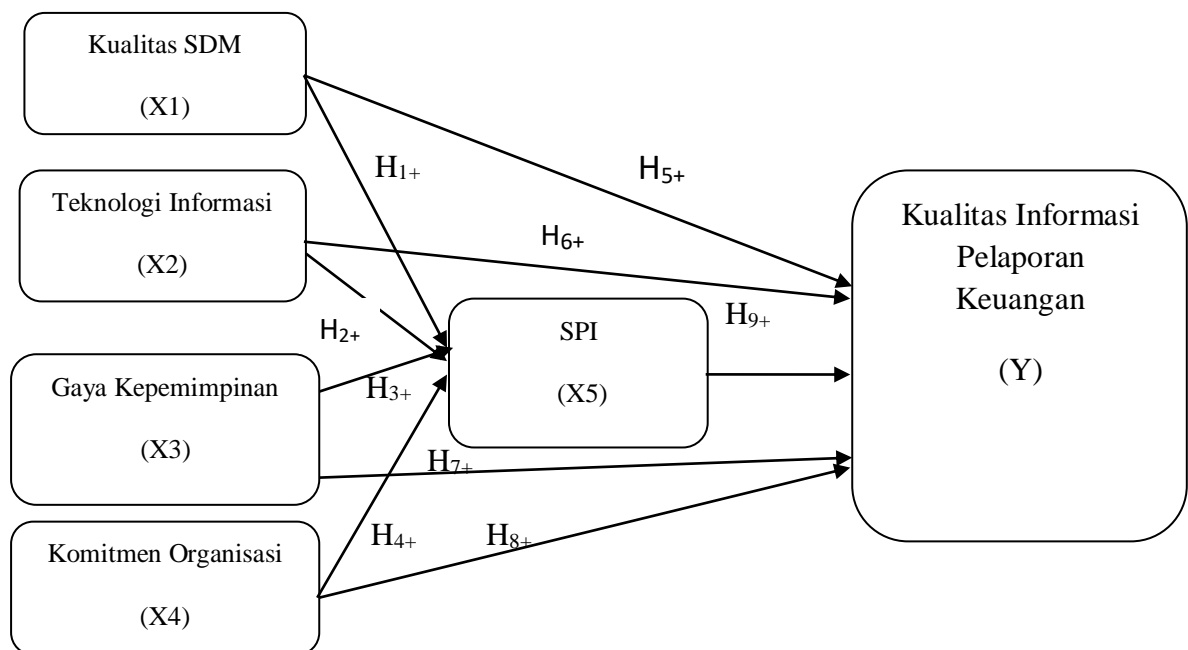
### **13. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah melalui sistem pengendalian internal**

Menurut Hebert & Gullet (1987) organisasi merupakan proses dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Menurut teori *steward*, SKPD sebagai organisasi memberikan pelayanan terbaik mereka kepada publik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas didalam organisasi perlu diterapkan sistem pengendalian internal dan didukung oleh komitmen organisasi pada aparatur daerah agar mereka dapat menunjukkan sikap loyal terhadap organisasi sehingga aparat daerah akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Individu-individu yang

memiliki komitmen dimana mereka mau bekerja dan tetap tinggal dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan loyalitas serta berusaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik maka tujuan dari sistem pengendalian internal dapat terwujud yakni berupa keandalan laporan keuangan dimana merupakan salah satu dari karakteristik kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan diterapkannya sistem pengendalian internal.

**H<sub>13</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.**

#### D. Model Penelitian



Gambar 2.1  
Model Penelitian